

BAB II

POROS MARITIM DUNIA SEBAGAI ORIENTASI KEAMANAN LAUT DAN GEOPOLITIK INDONESIA

Bab II ini memiliki penjelasan yang mendukung dan memperjelas substansi dari skripsi. Pembahasan pada bab II ini memiliki empat poin. Pertama, pembahasan Poros Maritim Dunia yang menjelaskan lebih lanjut secara mendalam terkait konsep tersebut. Kedua, geopolitik di Indo-Pasifik untuk menjelaskan dinamika yang terjadi dan mengapa dapat menjadi ancaman. Ketiga, pemetaan keamanan Indonesia dengan berisikan penjelasan mengenai titik kawasan rawan akan terjadinya ancaman maritim melalui analisis karakteristik perairan. Keempat, perkembangan doktrin pertahanan maritim (TNI AL) yang menjelaskan perubahan prinsip terhadap pengamanan laut Indonesia. Dengan demikian keempat poin tersebut dibuat secara berkesinambungan.

2.1 Poros Maritim Dunia

Poros Maritim Dunia (PMD) merujuk pada suatu visi yang menandai adanya perspektif baru di dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia semenjak era kontemporer. Visi PMD untuk kali perdananya diperkenalkan ke kancah internasional oleh Presiden RI Joko Widodo dalam forum KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 2014 silam (Setkab, 2014). Presiden Joko Widodo dalam hal ini menetapkan PMD sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang strategis. Momentum ini memperlihatkan Indonesia pada akhirnya memiliki hasrat untuk memanfaatkan identitas negara arsipelago sebagai tombak kebijakan.

Dampaknya adalah visi tersebut menjadikan kebijakan Indonesia bertumpu pada pengoptimalan sumber daya kelautan. Luhut B. Pandjaitan yang menempati pos jabatan Menteri Koordinator Marves RI menegaskan bahwasannya sudah menjadi waktunya kita (bangsa Indonesia) melakukan pengoptimalan sumber daya maritim dalam rangka menuju kemakmuran, keberlanjutan, dan kedaulatan (Kemenko Marves, 2023: 9). Dengan begitu visi PMD diterjemahkan sebagai bentuk pembangunan dari sektor kemaritiman yang diharapkan membawa kemajuan bagi Indonesia di berbagai sektor.

Kebijakan ini digagas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah, melainkan sebagai bentuk respon atas terjadinya perkembangan transformasi pada abad ke-21. Dalam pidato di Myanmar 2014, Presiden Jokowi memberi penegasan bahwa dinamika geoekonomi serta geopolitik saat ini tengah bergeser dari wilayah Barat ke arah Asia Timur, dan Indonesia memiliki posisi tepat di antara pergeseran tersebut (Portal Informasi Indonesia, 2019). Hal menarik dari perkataan Jokowi adalah motif pembentukan konsep PMD pada realitanya tidak hanya didasarkan atas romantisme sejarah sebagai ‘bangsa pelaut’, namun terdapat faktor perkembangan dinamika yang menjadi pertimbangan. Pidato ini secara tersirat memberikan sinyal adanya potensi dan tantangan yang dihadapi. Posisi Indonesia yang memiliki kedudukan vital sebagai salah satu jalur perdagangan skala internasional perlu dimanfaatkan melalui strategi maritim secara terukur dan berkelanjutan agar dapat mencapai kepentingan nasional di tengah dinamika kawasan. Di sisi lain pergeseran di sektor geoekonomi dan geopolitik yang terjadi di dunia ini juga mengindikasikan kehadiran tantangan bagi RI karena adanya

persaingan secara global serta meningkatkan risiko kejahatan maritim. Maka dari itu sektor maritim sangat perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga Pemerintah Indonesia menggagas konsep PMD.

Kalangan akademisi lantas menanggapi konsep yang menjadi visi Indonesia tersebut dengan kacamata berbeda sehingga bermakna variatif dan menimbulkan adanya perdebatan. Hal ini bukan tanpa alasan, beberapa akademisi menyoroti kata ‘poros’ dengan penafsiran secara beragam. Kata ‘poros’ ini kemudian dimaknai ke dalam tiga kategori. Pertama, poros sebagai *axis*. Yani dan Montrama (2015: 35) melihat poros sebagai suatu koalisi atau aliansi sebagaimana pernah terukir di dalam sejarah Indonesia yakni Beijing-Pyongyang-Jakarta. Aliansi atau poros zaman Sukarno pada 1965 tersebut memiliki maksud untuk menangkal imperialisme serta kapitalisme (Sylvia, 2020: 120). Berkaca pada fakta sejarah ini jika kata ‘poros’ dimaksudkan sebagai pembentukan aliansi dengan kekuatan kawasan regional, maka memiliki maksud serta tujuan ideologis di baliknya. Pendek kata kedua akademisi tersebut mengisyaratkan adanya pembentukan aliansi pasca kemunculan konsep PMD jika dikaitkan dengan sejarah dinamika geopolitik sebagai landasan alur berpikirnya.

Kedua, poros sebagai *nexus*. Sulaiman (2017) memaknai kata poros pada konsep PMD seperti hal nya titik pusat. Kontras dengan pemahaman sebelumnya yang mengarah kepada koalisi atau bersekutu, Sulaiman justru mengartikan poros sebagai pusat dan fokus bagi kegiatan diplomasi kemaritiman. Pengertian *nexus* ini menempatkan Indonesia selaku sumbu interaksi namun tetap mempertahankan kebebasan manuver demi mencapai kepentingan nasionalnya (Sulaiman, 2017).

Status sebagai negeri kepulauan terbesar dunia dan berada di area yang strategis menjadi dasar bagi Indonesia untuk mencapai posisi pemain dominan pada panggung geopolitik maritim. Singkatnya *nexus* mengindikasikan adanya penekanan terhadap keterlibatan diplomatik serta kolaboratif secara dominan dalam rangka menjalankan tugas sebagai titik sentral kawasan.

Ketiga, poros sebagai *fulcrum*. Meminjam pengertian dari *Netherland Maritime Land* di dalam Yakti dan Wicaksana, *fulcrum* diartikan sebagai upaya Indonesia untuk menempatkan pada posisi strategis dengan tujuan memastikan kontrol atau pengendalian terhadap perairan teritorialnya (Yakti & Wicaksana, 2021: 156). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Agastia (2016) yang melihat *fulcrum* pada PMD ke dalam dua dimensi yakni strategis dan ekonomis. Frasa strategis merujuk kepada Angkatan Laut Indonesia menjadi kekuatan regional dan ekonomis mengindikasikan adanya hubungan saling terhubung di sektor maritim. Dalam konteks PMD penjelasan ini jelas menggarisbawahi pentingnya upaya untuk meningkatkan serta memperkuat kedaulatan, keamanan, dan pengelolaan atas wilayah lautnya. Jadi *fulcrum* dalam PMD memberi penekanan guna meneguhkan peran Indonesia sebagai kekuatan maritim yang dilakukan dengan pengendalian perairan strategis.

Pemaknaan luas kata ‘poros’ pada PMD agaknya menimbulkan kebingungan akan tetapi yang dimaksud oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai ‘*fulcrum*’. Hal ini dibuktikan dengan visi nawacita yang penyusunannya dibantu oleh Andi Widjajanto dan Rizal Sukma selaku pembuat konsep PMD. Visi yang dirancang dengan kontribusi akademisi HI UI dan Direktur CSIS tersebut memiliki

tiga aspek, yakni (1) penguatan keamanan maritim; (2) memperluas keterlibatan serta peran diplomasi pada tingkatan regional agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indo-Pasifik; dan (3) melakukan proyeksi penguatan TNI AL dalam rangka menjadi kekuatan yang disegani di kawasan (Yakti & Wicaksana, 2021: 129). Sukma di dalam gagasannya juga memberi penekanan jika pada dasarnya PMD harus dicita-citakan guna mengembangkan kekuatan kemaritiman yang bersatu (*unity*), menjadi sejahtera (*prosperity*), dan memiliki kewibawaan (*dignity*) (Efriza, 2018: 44). Melihat visi tersebut, mudah dipahami bahwa Indonesia ingin memastikan adanya pengendalian secara optimal di sektor kemaritiman dan memainkan peran geostrategis sebagai penyeimbang atas jalur laut yang berada di antara dua samudera.

Visi tersebut berimplikasi terhadap dasar strategi yang dianut oleh Indonesia. Dalam menjalankan geostrategisnya di kawasan, tentu Indonesia tetap memainkan peran seperti pra PMD yakni sebagai kekuatan menengah. Alih-alih agresif, visi PMD mengarahkan Indonesia untuk menciptakan stabilitas di lingkaran regional. Corak *outward-looking* ini mengindikasikan adanya upaya guna mencoba menjadi pengimbang kekuatan Indo-Pasifik sekaligus poros tengah di antara kawasan samudera Hindia (India) dan Pasifik (Tiongkok dan AS) (Yakti & Wicaksana, 2021: 137). Pengimbang kekuatan pada visi PMD setidaknya dapat dimaknai sebagai membangun hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan regional dalam rangka meminimalkan segala risiko serta memastikan *national interest* dapat dicapai tanpa terseret konflik kepentingan kekuatan besar. Pada

akhirnya visi PMD memberikan atribut peran bagi Indonesia untuk aktif di dalam dinamika geopolitik maritim di Indo-Pasifik.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa PMD adalah suatu konsep potensial untuk mengamankan dan menggapai kepentingan nasional Indonesia di tengah kondisi yang tengah terjadi. Penetapan konsepsi ini sebagai bentuk inisiatif pemerintah untuk memperkuat kedaulatan sebagai negara maritim sekaligus respon atas kondisi Indo-Pasifik. Wilayah perairan yang luas ditambah dengan adanya perubahan dinamika secara geopolitik dan geoekonomi mengharuskan Indonesia untuk turut memastikan kestabilan kawasan serta keamanan teritorialnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu berfokus untuk melakukan proyeksi angkatan laut tanpa harus bersikap menantang negara lain. Dapat ditarik benang merah PMD tidak hanya ditafsirkan sebatas pembangunan infrastruktur kelautan melainkan kebijakan *outward-looking* untuk memosisikan Indonesia turut menjadi subjek aktif pada panggung politik kawasan.

2.2 Dinamika Indo-Pasifik

Dewasa ini kawasan Indo-Pasifik semakin meneguhkan dirinya sebagai salah satu lanskap kekuatan geopolitik yang krusial dalam dinamika hubungan internasional. Indo-Pasifik di dalam kamus hubungan internasional tidak lagi dibaca hanya dengan nuansa geografis semata melainkan ruang kontestasi sekaligus kolaborasi politik dan militer negara-negara di dalamnya. Istilah tersebut mempertemukan negara-negara kuat seperti Tiongkok, India, Australia, hingga Amerika Serikat. Bukan tanpa sebab, kawasan tersebut memiliki cakupan wilayah

dari Samudera Hindia, Pasifik Tengah dan Barat (Yadav, 2022: 7). Dalam kawasan inilah berbagai *national interest* negara saling bertemu, dan keamanan dipertaruhkan.

Dinamika Indo-Pasifik yang terjadi saat ini menurut negara-negara barat erat kaitannya dengan peristiwa kebangkitan Tiongkok. Negara dengan catatan historis yang panjang tersebut kini menjelma sebagai kekuatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh dunia. Tiongkok pada akhirnya berhasil lepas dari kepiluan masa lalu, di mana kondisi ekonomi yang mengalami stagnansi menjadi gambaran sehari-hari. Deng Xiaoping ialah aktor yang dapat dianggap berjasa di balik kebangkitan Tiongkok ini. Nama tersebut yang mencetuskan upaya reformasi ekonomi nasional negeri tirai bambu tahun 1978 sehingga membuka pandangan terhadap sistem pasar (Chow, 2018: 93). Implikasinya adalah peran pemerintah untuk mengatur jalannya roda perekonomian secara perlahan dikurangi, dan akhirnya memberi ruang yang lebih bebas kepada sistem pasar. Tiongkok pada saat ini bahkan berhasil menempati posisi kedua dalam peringkat ekonomi global PDB dunia (Jalil, 2019: 47; Statista, 2025). International Monetary Fund atau yang disingkat IMF memberikan keterangan jika Tiongkok saat ini menjadi penyumbang sepertiga pertumbuhan global (Saber, 2018). Jadi Tiongkok secara ekonomi mengalami tren positif yang sangat tinggi.

Tiongkok tidak hanya bangkit dari sektor ekonomi, namun proyeksi militer. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki hubungan timbal balik terhadap modernisasi sistem persenjataan (alutsista). Angkatan Laut adalah salah satu cabang militer yang mengalami transformasi paling signifikan. Angkatan laut

Tiongkok atau People's Liberation Army Navy (PLAN) berdasarkan catatan sejarah bermula pada pertahanan pesisir/*near coast defense*, kemudian berkembang menjadi *near seas active defense*, dan saat ini mampu berlayar dalam *far seas operations* sebagai *blue water navy* (Scott, 2019: 103-104). Transformasi ini menjadikan Angkatan Laut Tiongkok mampu menjelajah hingga Samudera Pasifik Barat dan Hindia (Scott, 2019: 104). International Institute for Strategic Studies dalam CSIS mencatatkan bahwa Tiongkok tahun 2023 mempunyai armada laut aktif sebanyak 234 sedangkan Amerika Serikat hanya 219 (Palmer, dkk, 2024). Maka dari itu, Tiongkok terlihat serius di dalam mengembangkan militernya.

Gambar 2. 1 Angkatan Laut Tiongkok Melakukan Latihan di Pasifik Barat pada 2018



Sumber: voachinese.com (2021)

Isu yang penting di tengah kebangkitan salah satunya adalah upaya Tiongkok untuk merencanakan geopolitiknya melalui oseanografi. Teknologi yang

kian canggih menjadi dorongan serius bagi negara tersebut untuk memperdalam informasi di lautan. Fokus penelitian oseanografi yang dilakukan Tiongkok terletak pada wilayah pinggiran maritim Laut Tiongkok Selatan, dan Samudra Pasifik Barat (Funiole, dkk, 2024). Manuver penelitian oseanografi oleh Tiongkok ini dipandang mencurigakan oleh beberapa pihak. Pasalnya tidak sedikit kapal oseanografi melakukan penelitiannya untuk menyediakan data bagi Angkatan Laut Tiongkok (PLAN) dan 80% lebih terlibat di dalam memajukan geopolitik Tiongkok (Funiole, dkk, 2024). Pendek kata Tiongkok agaknya ingin mendapatkan informasi melalui laut karena sebagai salah satu sumber kekuatan untuk menjalankan kepentingannya.

Keyakinan Tiongkok, kebangkitan yang dilaksanakan bukanlah menjadi ancaman. Negara yang kini kuat secara ekonomi dan militer tersebut tidak mendalilkan akan menaklukkan kekuatan lain, namun dipergunakan untuk memberikan kontribusi terhadap tatanan dunia. Deng Xiaoping yang menjadi arsitek reformasi dari awal pergerakannya telah mendalilkan bahwa Tiongkok menentang adanya hegemoni (Men, 2003: 16). Menurutnya ketika Tiongkok dalam berbagai sektor bertambah kuat, maka peluang perdamaian dunia yang dicitakan akan semakin meningkat (Men, 2003: 16). Xiaoping tampak berupaya untuk memberi jaminan kepada dunia bahwa kekuatan yang dibentuk bukan untuk menekan, melainkan menstabilkan. Perkataan senada juga dikemukakan oleh Hu Jintao, yang dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 2013 memberikan pidato bahwa Tiongkok berkomitmen untuk melakukan pembangunan secara damai melalui prinsip hidup berdampingan (MoFA The People's Republic of China,

2009). Ringkasnya menurut Tiongkok sendiri perkembangan yang sangat mencolok ini tidak bermaksud untuk memicu ancaman.

Amerika Serikat memaknai kebangkitan Tiongkok dengan sudut pandang yang berbeda. Jika Tiongkok merasa kekuatan yang dibangun sebagai sebuah harapan, maka Amerika Serikat membaca situasi tersebut dengan ancaman. Washington ketika awal mula kebangkitan Tiongkok sedang dalam kondisi yang terdistraksi. Kejadian 9/11 yang menghebohkan pada awal abad ke-21 menyebabkan perhatian Amerika Serikat tersita perhatiannya untuk melawan terorisme global melalui kebijakan luar negerinya yaitu *Global War on Terrorism* (GWOT) (Yadav, 2022: 9). Tiongkok membaca situasi tersebut sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melancarkan kebangkitannya. Mengingat posisi dominannya di kawasan menurun, Amerika Serikat memberikan respon dengan membentuk suatu aliansi (Yadav, 2022: 8). Amerika Serikat menggandeng negara-negara sahabat untuk memperkuat kerja sama di dalam merespon kebangkitan Tiongkok.

Aliansi kerap dibentuk oleh Amerika Serikat beserta sekutunya sebagai bentuk respon dalam tren kebangkitan Tiongkok. Konstelasi kekuatan yang kian kompleks menyebabkan sekutu Amerika Serikat tidak cukup kuat untuk menahan laju Tiongkok secara sendiri (Goswami, 2022: 12). Maka dari itu lahirlah sebuah forum Dialog Keamanan Segi Empat yang dikenal sebagai The Quad dengan beranggotakan negara Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Bagi keempat negara tersebut, forum ini strategis dan dirancang untuk satu tujuan yakni menyeimbangkan dominasi Tiongkok di Indo-Pasifik (Goswami, 2022: 12).

Donald Trump maupun Joe Biden sepakat pada satu pemikiran, bahwa The Quad adalah instrumen penting untuk mengembalikan fokusnya ke Indo-pasifik (The Guardian, 2022). Pendek kata The Quad merupakan bentuk respon serius terutama bagi Amerika Serikat dalam melihat situasi yang berkembang di Indo-Pasifik.

AUKUS adalah aliansi keamanan lain yang dibentuk untuk merespon situasi. AUKUS, aliansi yang dibentuk pada September 2021 dan beranggotakan Australia, United Kingdom, & United States of America dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan masing-masing dalam hal keamanan melalui transfer informasi serta teknologi (U.S. Department of Defense, 2023). Menurut Goswami (2022: 12) tujuan utama dari aliansi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan keberanian angkatan laut Australia untuk merespon dan memantau pergerakan Tiongkok. Bentuk kerja sama yang diberikan yaitu membantu membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia (Wintour, 2021). Mudahnya, AUKUS adalah respon lain yang dibentuk untuk saling memperkuat sektor keamanan terutama Australia.

Negara Uni Eropa selain Inggris yakni Prancis juga menaruh perhatian atas kondisi yang terjadi di Indo-Pasifik. Negara tersebut melihat, memahami, dan menimbang dinamika yang kian memanas pada kawasan strategis ini. Prancis menilai bahwa terdapat peningkatan dari Tiongkok sehingga memicu adanya persaingan terhadap Amerika Serikat di Indo-Pasifik (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2021: 2). Pada akhirnya, Prancis juga menyusun pandangan dan strategi militer (angkatan laut). Secara pandangan, Prancis berupaya untuk

mempertahankan kawasan yang memiliki sifat terbuka, inklusif, berdasar pada multilateralisme, dan menghormati hukum internasional sehingga bebas dari segala paksaan (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2021: 2). Prancis pada pertengahan 2010 secara aktif juga memberikan sinyal militer dan memperkuat koordinasi dalam rangka mempertahankan status quo dan menjalankan hukum internasional (Willigen & Blarel, 2024: 36). Dengan demikian Prancis memberikan respon atas dinamika di Indo Pasifik.

Jadi Indo-Pasifik dipenuhi dengan dinamika yang kompleks. Negara-negara di dalamnya saling unjuk perspektif pada panggung kawasan tersebut. Pada akhirnya kawasan ini dijadikan sebagai konstruksi ekonomi, politik, dan militer. Dampaknya adalah terjadinya kekhawatiran bagi banyak pihak akan dinamika yang terjadi. Maka dari itu, negara-negara di dalamnya perlu untuk membaca dan memahami atas apa yang terjadi sehingga dapat menentukan arah secara tepat.

2.3 Pemetaan Keamanan Indonesia

Negeri maritim adalah satu dari beberapa julukan yang disematkan oleh dunia kepada Indonesia. Kata tersebut tidak boleh dipahami hanya julukan semata melainkan dihayati sebagai cerminan nyata dari fakta geografis. Data menunjukkan wilayah perairan Indonesia mencakup 70% lebih dari total luas negara (Kemenko Marves RI, 2020). Perairan yang begitu luas menjadi salah satu tumpuan kehidupan bagi Republik ini. Nelayan, industri berbasis maritim, hingga wisata bahari merupakan bukti adanya potensi serta melimpahnya kekayaan yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam luasnya lautan tersimpan potensi sumber daya ikan yang

diperkirakan hingga menyentuh angka sebesar 12,54 juta ton per tahunnya (Kementerian KKP RI, 2024). Makna dari fakta tersebut yaitu laut bukan sekedar hamparan air yang mengelilingi pulau di seluruh Indonesia namun sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional, dan kehidupan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang diberikan keistimewaan dalam letak geografis juga menjadikannya sebagai salah satu nadi kehidupan jalur konektivitas bagi dunia. Terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik menjadikan kapal-kapal dari negara lain silih berganti melintasi perairan Indonesia demi menjalankan kepentingan masing-masing. Lantas, dunia menetapkan empat titik wilayah perairan Indonesia menjadi *choke point*. Selat Sunda, Lombok, Malaka, dan Makasar mengemban peran sebagai bagian *choke point* dunia (Kementerian Pertahanan RI, 2014: 30). Lewis Alexander (1992: 504) memberikan penjelasan bahwa *choke point* memiliki tiga karakteristik, yakni wilayahnya sempit serta dapat ditutup untuk kepentingan komersial atau militer, tidak ada jalur alternatif, dan memiliki signifikansi bagi negara lain. *Choke point* jika mengacu karakteristik yang dikemukakan oleh Lewis dapat diartikan dengan daerah perairan sempit yang memiliki nilai esensial bagi jalur internasional. Jadi karena faktor geografis, keempat selat tersebut menjadi salah satu kunci kesuksesannya laju perdagangan global.

Posisinya sebagai jalur konektivitas internasional membuat Indonesia menetapkan peraturan hak lintas. Republik ini memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai dasar dan pedoman pengaturan perlintasan kapal asing secara resmi di kawasan perairan NKRI (Peraturan Pemerintah RI, 2002). Dengan

kata lain aturan ini tidak sekedar garis formalitas yang ditetapkan namun memastikan pembagian konektivitas dapat berjalan dengan aman dan lancar. Indonesia membagi ALKI menjadi tiga (Agoes, 2009: 364). ALKI I meliputi daerah Selat Sunda, Karimata, Natuna, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Singapura. ALKI II meliputi daerah Selat Lombok, Makasar, Laut Sulawesi. ALKI III meliputi daerah Laut Maluku, Seram, Selat Ombai, Laut Suwu/Timor/Arafura. Pembagian jalur konektivitas ini memberikan kemudahan bagi kapal yang melintas dengan tetap menghormati kedaulatan daripada negara Indonesia.

Gambar 2. 2 Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber: Maritimeneews, 2017

Posisi strategis yang Indonesia miliki tidak selalu memberikan jaminan keamanan justru acap kali memunculkan kemungkinan ancaman. Lautan Indonesia yang begitu luas dan penuh dengan nilai positif di berbagai sektor justru dimanfaatkan sebagai sasaran. Ancaman yang menghantui Indonesia setidaknya

berupa perompakan, dan IUU fishing, permasalahan klasik yang tergabung ke dalam isu non-tradisional. Permasalahan tidak berhenti sampai di situ, akhir-akhir ini muncul ancaman baru yakni penemuan *seaglider* atau *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV). *Seaglider* adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data oseanografi melalui pengukuran di lokasi terpencil dan mampu mempelajari fenomena dengan skala hingga ribuan kilometer serta dalam waktu tahunan (Eriksen, dkk, 2001: 435). Mengutip perkataan Akademisi Unpad R. Achmad Gusman, Ph.D., jika mengikuti aturan pada hukum laut UNCLOS 1982, maka aktor yang ingin melakukan riset harus terlebih dahulu meminta izin kepada negara pantai (Universitas Padjajaran, 2021). Maka dari itu, ketika terdapat *seaglider* haruslah terdeteksi terlebih dahulu oleh alat pertahanan keamanan negara apalagi jika tidak ada izin. Namun tidak semua wilayah perairan di Indonesia memiliki potensi ancaman yang sama. Sifat dan karakteristik dari tiap wilayah perairan akan menentukan ancaman yang muncul. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemetaan keamanan maritim Indonesia dalam rangka mengetahui titik rawan yang sering terjadi.

Pemetaan keamanan dapat dilakukan setidaknya dengan melihat karakteristik daripada geografi perairan Indonesia. Karakteristik yang diambil untuk melakukan pemetaan ada tiga. Pertama, perairan sempit dan aktivitas maritim. Perairan sempit yang ramai dilintasi kapal menyebabkan potensi terjadinya tindak kejahatan semakin besar, terutama perompakan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, menurut Johri dan Krishnan (2019: 92) perompakan dapat terjadi karena dua faktor diantaranya, yakni padatnya lalu lintas kapal serta berada

pada wilayah perairan yang sempit (*bottlenecks*). Kapal yang melintas pada perairan sempit akan memperlambat lajunya sehingga kondisi seperti ini mampu dimanfaatkan oleh para perompak untuk menjalankan aksinya. Di Indonesia titik sempit tersebut berada pada empat *choke point*. Kondisi geografis dari lokasi tersebut memantik kerawanan akan terjadinya kejahatan perompakan sehingga diperlukan perhatian khusus demi melakukan pengamanan.

Kedua, perairan sekitar perbatasan. Indonesia sebagai negara kepulauan bukan hanya mempunyai kedaulatan melainkan hak berdaulat yang juga termasuk ke dalam bagian perbatasan maritim. Hak ini diberikan dalam bentuk ZEE atau dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. UNCLOS (1982: 43) sebagai hukum laut internasional mengatur bahwa negara pantai memiliki hak di kawasan ZEE untuk melakukan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya. Namun ZEE sekaligus perbatasan maritim Indonesia yang seharusnya sebagai tanda hak kedaulatan tidak luput dari adanya tindak kejahatan, salah satunya IUU fishing. Para pelaku *transnational organized crime* tersebut seringkali ditemukan di perairan Sulawesi Utara, Natuna Utara, Arafura, dan sekitar Maluku Utara (Tjahjono, 2023: 2). IUU fishing sangat memungkinkan terjadi apabila ZEE tumpang tindih dengan negara tetangga. Nelayan Vietnam misalnya pada Juni 2021 terekam melakukan tindakan IUU fishing di daerah tumpang tindih batas ZEE dengan Indonesia (IOJI, 2021). Ironisnya kejadian tidak hanya terjadi di wilayah tumpang tindih, Laut Sulawesi yang berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 2017 tentang Persetujuan Batas ZEE antara Indonesia dengan Filipina menunjukkan bahwa walaupun status hukum

sudah ditetapkan secara resmi, pelanggaran masih kerap terjadi. Maka dari itu wilayah perbatasan juga memiliki potensi ancaman keamanan maritim bagi RI.

Ketiga, wilayah strategis. Wilayah strategis yang dimaksud dua diantaranya yaitu memiliki nilai sejarah dan sumber energi. Perairan Indonesia menjadi saksi yang menyimpan sejarah panjang peradaban sehingga tidak jarang ditemukan benda peninggalan masa lampau. Perairan selasar contohnya, pada kawasan ini telah ditemukan benda yang diduga berasal dari peninggalan kapal VOC Walvis berupa jangkar dan meriam yang tenggelam pada 1663 (Kementerian KKP RI, 2021). Pada sisi lain, perairan juga mampu digunakan sebagai sumber energi melalui pemanfaatan perbedaan temperatur yang disebut sebagai *Ocean Thermal Energy Converter* di kawasan Bali, Sulawesi hingga Papua (Karima, S., & Ahada, I., 2014: 7). Perairan yang strategis tersebut perlu diwaspadai untuk mencegah adanya penelitian secara ilegal oleh negara atau pihak lain. Maka dari itu daerah strategis perlu masuk ke dalam kategori pemetaan keamanan.

Pemetaan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Bagi Indonesia, daerah kawasan perairan wajib dipahami dengan baik dan cermat agar dapat mengetahui potensi ancaman yang muncul. Dengan menggunakan pendekatan karakteristik perairan, aktivitas maritim, dan perbatasan yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi bagian kecil dari pemetaan keamanan untuk menentukan langkah. Tindakan ini dilakukan bukan hanya sekedar memahami ancaman melainkan menentukan prioritas. Namun penetapan skala prioritas tidak menjadikannya menutup mata pada wilayah perairan lain. Hal ini dikarenakan

seluruh perairan memiliki potensi ancaman dan saling terhubung. Jadi pemetaan keamanan adalah langkah awal untuk merespon ancaman yang hadir.

2.4 Perkembangan Doktrin Pertahanan Maritim Indonesia (TNI AL)

Doktrin di dalam dunia pertahanan tidak hanya identik dengan cara menaklukkan lawan pada medan perang namun memiliki arti yang lebih luas dan mendalam. Doktrin pertahanan negara merupakan ajaran yang memberikan arah dalam mengelola segala sumber daya pertahanan melalui prinsip fundamental (Kementerian Pertahanan RI, 2014: 2). Negara dalam menjaga keamanan daripada wilayahnya tidak hanya membutuhkan kekuatan secara *tangible* seperti prajurit, dan alutsista melainkan nilai dasar pertahanan yang baik. Ibarat kitab, doktrin bertugas sebagai dasar kendali, dan acuan dalam menentukan langkah serta berbagai keputusan melalui prinsip. Tanpa adanya doktrin, pengelolaan kekuatan negara hanya berkembang tanpa arah. Makna yang sangat luas menyebabkan doktrin sangatlah penting untuk menjadi dasar keamanan negara.

Di Indonesia, doktrin pertahanan tersusun secara bertingkat. Stratifikasi ini terbagi menjadi tiga tingkat (Kementerian Pertahanan RI, 2014:14). Tingkatan paling atas ditempati dengan Doktrin Dasar yang memiliki ruang lingkup dan fungsi di bawah Kementerian Pertahanan RI. Tingkatan menengah ditempati dengan Doktrin Induk yang terbagi ke dalam sektor militer dan nirmiliter. Tingkatan bawah ditempati dengan Doktrin Pelaksanaan. Stratifikasi ini dirancang agar doktrin dapat terarah dan terstruktur sesuai dengan tingkat penggunaannya. Jadi pembentukan

stratifikasi ini dalam rangka memastikan adanya keterpaduan, dan kesinambungan dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

Doktrin pertahanan maritim atau TNI AL berada pada tingkat Pelaksanaan. Kedudukan ini dipertimbangkan mengingat Angkatan Laut tergabung ke dalam tiga matra sehingga mengemban tupoksi sebagai alat pelaksana pertahanan negara. Penempatan ini juga didasarkan atas pengembangan doktrin dari Mabes TNI oleh setiap Angkatan (Darat, Laut, dan Udara) (Kementerian Pertahanan RI, 2014: 15). Artinya setiap manuver yang dilakukan oleh TNI AL bukan hasil spontanitas, tapi bagian daripada rancangan garis besar secara terstruktur. Dengan begitu doktrin TNI AL dipergunakan sesuai kedudukannya sebagai pedoman di dalam melaksanakan setiap tugas.

TNI AL dalam perjalanannya menjadi alat pertahanan negara telah mengalami perkembangan doktrin. Mulai dari orde lama, baru, hingga reformasi saat ini, TNI AL senantiasa melakukan penyesuaian. Doktrin berubah bukan tanpa alasan, namun situasi memaksanya untuk menyesuaikan. Angkatan Laut Indonesia senantiasa berupaya adaptif untuk menjalankan tugas pokoknya dengan optimal di setiap masa. Ringkasnya setiap orde, TNI AL memiliki historis doktrin.

Era orde lama tepatnya tahun 1965, Angkatan Laut Republik Indonesia atau saat ini dikenal sebagai TNI AL menetapkan suatu doktrin yang bernama *Eka Sasana Jaya*. Penetapan doktrin tersebut didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Menteri/Panglima Angkatan Laut pada Agustus 1965 (Markas Besar TNI AL, 2006: 2). Angkatan Laut pada waktu itu memandang doktrin tersebut tidak hanya sebatas ajaran dan prinsip secara militer semata, akan tetapi jiwa pengorbanan yang

membara. *Eka Sasana Jaya* lahir dari sikap patriotisme bangsa di dalam merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dari tangan Belanda dan peristiwa konfrontasi dengan Malaysia (Hardianto, 2021: 8). Peristiwa merebut kembali Irian Barat khususnya, menunjukkan sikap prajurit Angkatan Laut yang gigih, berani, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang luar biasa. Pesan secara tersirat dari penetapan doktrin ini terhadap prinsip perang laut dua diantaranya adalah teguh pada tujuan (memiliki arah yang jelas serta konsisten dalam setiap operasi laut) dan ofensif demi mencapai keberhasilan (Markas Besar TNI AL, 2001: 35). Melalui doktrin ini, TNI AL terlihat ingin menanamkan nilai-nilai kepahlawanan terlebih dahulu di dalam setiap prajurit agar semangat pengabdian tidak akan pernah luntur dan tetap terjaga sampai kapanpun demi menjaga kehormatan di laut Indonesia.

Era Orde Baru, doktrin TNI AL mengalami perubahan. TNI AL tidak lagi mengenakan *Eka Sasana Jaya* melainkan *Sad Daya Dwi Bhakti* sebagai doktrin baru yang berisikan gabungan tiga Angkatan (Darat, Laut, dan Udara). *Sad Daya Dwi Bhakti* ditetapkan sebagai doktrin pelaksanaan pertahanan berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata RI (ABRI) tahun 1994 (Markas Besar TNI AL, 2001: 4). Dalam era Orde Baru, militer termasuk TNI AL diarahkan untuk fokus terhadap menjamin adanya keamanan dalam negeri melalui langkah preventif. TNI AL dalam doktrin *Sad Daya Dwi Bhakti*, memperkenalkan “Dimensi Operasi TNI-ABRI” yang salah satunya berisikan terkait konsep pertahanan keamanan laut teritorial Nusantara sebagai operasi laut (Widjajanto, Andi, n.d: 20). Konsepsi ini mengisyaratkan adanya arah defensif yang diterapkan untuk mencegah musuh masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, konsepsi tersebut

berisikan strategi penangkalan/*deterrence*, pertahanan berlapis, dan pengendalian laut (Aprianto, 2018: 13; Yakti & Wicaksana, 2021: 119). Militer termasuk TNI AL juga memiliki peran di bidang sosial politik (sospol) yang tergabung dalam salah satu gelar pelibatan (Widjajanto, n.d: 19). Pendek kata doktrin TNI AL era Orde Baru menekankan adanya dua fungsi yakni di sektor keamanan dengan mengedepankan upaya preventif dan penempatan fungsi sosial politik.

Era reformasi untuk tahun 2018, TNI AL kembali merubah doktrinnya menjadi *Jalesveva Jayamahe*. Doktrin ini ditetapkan atas dasar keputusan Panglima TNI tahun 2018 (Dachi, 2023). TNI AL menetapkan doktrin ini berdasarkan pertimbangan jati diri bangsa. *Jalesveva Jayamahe* sesuai dengan artinya justru di laut kita jaya atau menang menjadi pengingat bahwa perairan adalah salah satu sumber kekuatan (TNI AL, n.d). Indonesia, negeri dengan budaya maritim yang kaya akan kisah-kisah kejayaan menjadikan keamanan Republik ini salah satunya bersandar pada Angkatan Laut. Doktrin ini menjadi pemantik para prajurit TNI AL untuk selalu senantiasa memberikan rasa aman di perairan dengan menghayati jati diri identitas bangsa Indonesia.

Doktrin TNI AL *Jalesveva Jayamahe* sejalan dengan konsepsi pembangunan PMD. Pandangan yang sama antara doktrin dengan konsep PMD menjadi alasan mengapa keduanya bisa selaras. *Jalesveva Jayamahe* yang berarti justru di laut kita jaya atau menang bertolak dari vitalnya perairan Indonesia dalam berbagai sektor. Di sisi lain, PMD memandang perairan sebagai elemen kekuatan dalam membangun kepentingan nasional dan untuk merespon geopolitik. Maknanya, baik doktrin dan PMD sepakat bahwa laut menjadi aset strategis

nasional yang harus mendapat perhatian khusus. Implikasi dari adanya kesamaan pandangan tersebut adalah bahwa TNI Angkatan Laut tengah mempersiapkan kerangka prinsip guna mendukung pembangunan PMD.

Doktrin *Jalesveva Jayamahe* dalam konsep pembangunan PMD memakai satu prinsip yakni defensif aktif sebagai bentuk penyesuaian. Prinsip ini menjadi landasan bagi negara agar pertahanan dapat dilakukan tanpa adanya sifat agresif dan ekspansif namun tetap bersandar pada kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2015: 52). Dalam pandangan Angkatan Laut, defensif aktif berarti mempersiapkan kekuatan yang mampu untuk sigap, siaga, dan tegas dalam menjaga perairan tanpa harus menantang pihak lain. Pola pertahanan seperti ini juga mencerminkan perintah konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 terkait melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Pendek kata, postur pertahanan keamanan telah disesuaikan dalam kerangka PMD.

Catatan sejarah ini membuktikan bahwasannya doktrin bukanlah hal yang statis sehingga bisa berubah sesuai dengan tuntutan kondisi. Perubahan yang terjadi tidak dapat ditafsirkan sebagai pembaruan semata, namun mempersiapkan pandangan secara relevan untuk menangani ancaman sesuai dengan tantangan. Doktrin yang saat ini dipakai merupakan hasil pembelajaran dari dialektika sejarah dan proses penyesuaian akan perkembangan lingkungan. Perjalanan TNI AL dimaknai juga sebagai upaya memperkuat organisasi tanpa harus bersikap agresif. Karena seperti yang diucapkan Najwa Shihab, “Angkatan Laut yang perkasa bukan provokasi untuk perang tapi jaminan perdamaian, mereka juga lambang kekuatan

menunjukkan seberapa mampu sebuah negeri menjaga rakyat dan tanah airnya dari wilayah perairan” (Narasi, 2023).